**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

1. **Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta menjalankan fungsi sebagai *Lender Of The Last Resort* yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Titik balik berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral setelah terjadinya Konfrensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang diadakan di *Den Haag* memutuskan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral.*De Javasche Bank* adalah sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi *(Bank Of Issuing Money)* di Hindia-Belanda.

Keputusan KMB ini dikatakan sebagai titik balik berdirinya bank sentral karena sejak 1946 di Indonesia telah berdiri pula Bank Negara Indonesia (BNI) yang dimaksud sebagai bank sentral. Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberikan tugas sebagai bank pembangunan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kebutuhan dari negara baru mereka.Disatu pihak negara membutuhkan sebuah bank sirkulasi dan bank sentral yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan dilain pihak membutuhkan bank yang bertugas untuk membiayai pembangunan.

Kesepakatan terhadap penunjukan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia tidak terjadi begitu saja. Selain landasan politisi, alasan lain menunjukkan bahwasanya *De Javasche Bank* telah beroperasi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828. Dapat dikatakan bahwa *De Javasche Bank* merupakan bank komersial yang sekaligus berfungsi sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara.

Pendirian *De Javasche Bank* pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah Belanda sebagai perpanjangan tangan dari *De Nederlanche Bank* guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia-Belanda. *De Javasche Bank* diberi hak monopoli dalam mengeluarkan uang kertas dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Disisi lain bank ini juga bergerak dibidang komersial dengan penerima simpanan dan menyalurkan kredit. Keberadaan ini bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara penduduk Jepang berhasil memaksa pemerintah Hindia-Belanda menyerah setelah selang tiga tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 9 Maret 1942 tentara penduduk Jepang merampas semua bank-bank milik pemerintah Hindia-Belanda dengan memaksa menandatangani surat penyerahan kepada penguasa Jepang. Setelah dilakukan pembubaran peran bank digantikan oleh 3 bank Jepang, yaitu Yokohama Speie, Taiwan Bank, dan Mitsu Bank. Adapun fungsi bank sentral diambil oleh Yokohama Speie Bank untuk daerah jawa dan Taiwan Bank untuk daerah diluar jawa.

Fungsi bank sentral ini sempat terganggu oleh *De Nederlanche Indische Ciciele Adminintratie* (NICA) masuk ke Indonesia tahun 1945.Saat itu sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan menarik uang yang beredar, khususnya yang invasi pemerintah Jepang dan diikuti dengan penyebaran uang NICA. Tujuan jelas ingin menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang baru merdeka. Dengan serangan dibidang ekonomi dan tekanan diplomasi dan senjata akhirnya NICA berhasil menguasai sebagian wilayah RI. Pada periode ini, beredar 3 (tiga) jenis mata uang, yaitu uang invasi Jepang, uang NICA, dan Oeang Republik Indonesia (ORI).Fungsi bank diwilayah RI dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang waktu itu terbentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI). *De Javasche Bank* sendiri menjalankan fungsi bank sentral didaerah penduduk NICA.

Setelah proklamasi pemerintah mengeluarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta tertanggal 16 September 1945 yang isinya menugaskan kepada anggota dewan pertimbangan untuk langkah pertama pembentukan hak sirkulasi di Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1946, dikeluarkan UU No. 02 Prp. tahun 1946 tentang pembentukan dan penetapan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi dan bank sentral milik negara.

Oleh karena saat Konfrensi Meja Bundar, terjadi tarik-menarik antara pemerintah Belanda dengan Indonesia untuk menjadikan bank sebagai bank sentral.Namun keputusan final KMB akhirnya menunjukkan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral. Keputusan ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, yang melontarkan keinginan untuk melakukan nasionalisasi terhadap Bank Belanda tersebut.

Untuk melanjutkan upaya nasionalisasi, pada akhirnya Juli 1951 pemerintah melakukan negoisasi pembelian saham-saham. Proses nasionalisasi ini sebenarnya sudah termasuk dalam kesepakatan hasil KMB. Pada tanggal 3 Agustus 1951 pemerintah Indonesia mengajukan penawaran melalui surat kabar kepada pemilik saham *De Javasche Bank*. Sejak saat itu fungsi bank sentral dijalankan oleh *De Javasche Bank* yang diganti namanya dengan Bank Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya perbankan difungsikan sebagai penyedia dana bagi proyek-proyek dan secara bertahap diarahkan kepada sistem bank tunggal.

Berdasarkan penetapan presiden No. 17 tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan dileburkan dengan nama Bank negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit, yaitu BNI unit I, unit II, unit III, dan unit IV. Bank Negara Indonesia unit I berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Sesuai dengan TAP MPRS No.XII/MPRS/0966, pemerintah menyampaikan RUU Pokok Perbankan, RUU bank sentral, dan RUU Pendirian Enam Bank Pemerintah. Dengan lahirnya UU itu, maka secara otomatis mengubur “Bank Tunggal” sekaligus meneguhkan keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.

Kantor Bank Indonesia Medan (semula bernama kantor cabang Medan) mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Bank Indonesia merupakan kantor cabang *De Javasche Bank* yang ke-11. Pembukaan Kantor Cabang Medan, Tanjung Balai, dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang kebjaksanaan moneter pemerintah Hindia-Belanda (atas usul *De Javasche Bank*) yang ketika itu memberlakukan Guldenisasi bagi Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

Dengan berkembangnya kegiatan Kantor Bank Indonesia Medan dan adanya resesi dunia tahun 1930-an maka kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya ditutup. Pada saat berdirinya, kantor cabang medan menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah didekat *Esplanade* (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter “Guldenisasi” karesidenan pantai timur sumatera. Untuk persiapan pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor kedua tempat itu. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembanguanan gedung beberapa kantor cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L. Von Hemert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Musschenbroek dan pada saat Undang-undang Bank Indoensia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia cabang Medan adalah M. Rifai.

1. **Visi, Misi, dan Sasaran Strategis**

**Visi dan Misi Bank Indonesia**

Adapun Visi dan Misi Bank Indonesia adalah :[[1]](#footnote-1)

**Visi :**

1. Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel yang terbaik dan regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.
2. Memperjelas arah organisasi kedepan.
3. Memotivasi anggota Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
4. Mengkoordinasikan tindakan serta kebijakan dari anggota Dewan Gubernur dan pegawai secara efisien dan efektif.
5. Memberikan keyakinan dalam pencapaian misi organisasi.

**Misi :**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dalam gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan sosial.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola *(governance)* yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-undang.

**Visi dan Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Adapun Visi dan Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah :[[2]](#footnote-2)

**Visi :**

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksaan tugas Bank Indonesia dan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

**Misi :**

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

**Sasaran Strategis Bank Indonesia Medan**

Adapun sasaran strategis Bank Indonesia Medan adalah :[[3]](#footnote-3)

1. Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
2. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.
3. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
4. Pengelolaan keuangan satker secara efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja.
6. Meningkatkan pengawasan bank yang efektif yang mendukung pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
7. Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran.
8. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang efektif kepada *stakeholders.*
9. Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance.*
10. Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompetensi tinggi dengan dukungan Budaya Kerja yang berbasis pengetahuan.
11. **Status Dan Kedudukan Bank Indonesia**

Status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. **Sebagai Lembaga Negara yang Independen**

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen dimulai ketika sebuah Undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status kedudukan Kantor Bank Indonesia sebagai suatu Lembaga Negara yang Independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

1. **Sebagai Badan Hukum**

Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan Undang-undang. Sebagai badan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

1. **Tugas Pokok Dan Produk Satuan Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Adapun tugas pokok dan produk satuan kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah :[[5]](#footnote-5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tugas Pokok** | **Produk Pokok** |
| Mengembangkan ekonomi daerah dan melaksanakan tugas fungsi advisor pada Kepala daerah. | Terlaksananya peran KPwDN sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah dan advisor kepada Kepala Daerah. |
| Melaksanakan *Regional Financial Surveillance.* | Terlaksananya *Regional Financial Surveillance.* |
| Mengumpulkan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dipusat maupun daerah setempat. | Terkelolanya data yang efektif dan akurat dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dipusat maupun daerah setempat. |
| Mengelola distribusi uang. | Terkelolanya distribusi uang didaerah secara efektif dan efisien. |
| Mengelola sistem pembayaran. | Terkelolanya dukungan sistem pembayaran didaerah serta terlaksananya peran KPwDN sebagai katalis dalam transaksi pembayaran melalui elektonifikasi. |
| Mengembangkan *Financial Inclusion* dan UMKM. | Terlaksananya program pengembangan *Financial Inclusion* dan UMKM didaerah yang sejalan dengan target pencapaian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah. |
| Melaksanakan Komunikasi Kebijakan. | Terlaksanya komunikasi kebijakan kepada *stakeholders* daerah secara efektif dan berkontribusi positif terhadap citra Bank Indonesia didaerah. |
| Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN kota/kabupaten. | Terlaksananya koordinasi terhadap pelaksaan tugas KPwDN kota/kabupaten. |
| Mengelola Administrasi anggaran, Logistik, SDM, Kesekretariatan, serta Manajemen Kinerja Satker. | Terkelolanya fungsi Administrasi anggaran, Logistik, SDM, Kesekretariatan, serta Manajemen Kinerja Satker secara akuntabel serta transparan. |

1. **Tujuan Bank Indonesia**

Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Kesetabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kesetabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kesetabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

1. **Makna Logo Bank Indonesia**

Gambar : 3.1.

Logo Bank Indonesia

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki logo atau lembaga yang memiliki makna tersendiri yang biasanya menunjukkan cita-cita pendirian, visi dan misi dari perusahaan tersebut, demikian halnya dengan Bank Indonesia mempunyai logo.

Arti logo bagi perusahaan selain sebagai lambang juga fungsi sebagai identitas yang dimiliki karakter dari suatu perusahaan. Bagi Bank Indonesia, pemasangan logo BI akan sangat membantu strategi komunikasi dalam menceritakan dirinya sebagai bagian dari sistem perbankan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara Kestabilan Nilai Rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kstabilan terhadap mata uang negara lain.

Logo Bank Indonesia mencantumkan nilai keseimbangan, keteraturan dan kesempurnaan. Keseimbangan, keteraturan dan kesempatan termasuk dalam aspek yang terdapat dalam kestabilan nilai rupiah.

1. **Sturuktur Organisasi**

**Departemen Regional**

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia**

Kepala Perwakilan (DE)

k

KPwDN

Kota/Kabupaten

PM

ICO

**Grub SP, PUR, Layanan dan Administrasi**

Kepala Grub (D)

Divisi SP dan PUR

Kepala Divisi (DD)

**Grub Advisory dan Pengembangan Ekonomi**

Kepala Grub (D)

Tim PUR dan Operasional SP

Kepala Kasir (AD)

Unit Distribusi Uang

Kasir Senior (M)

Unit Layanan dan Administrasi Kas

Kasir Senior (M)

Unit Pengelolahan Uang

Kasir Senior (M)

Divisis Pengembangan Ekonomi

Kepala Divisi (DD)

* Fungsi Koordinasi dan Kominikasi Kebijakan
* Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

\*Analisis Senior (AD)

\*Analisis (M)

\*Analisis (AM)

\*Pelaksana Yunior (S)

Divisi Advisorry Ekonomi dan Keuangan

Kepala Divisi (DD)

* Fungsi Data dan tatistik Ekonomi dan Keuangan
* Fungsi Asesman Ekonomi dan Survellane

\* Analisis Senior (AD)

\*Analisis (M)

\* Analisis (AM)

\* Pelaksana Yunior

Tim Pengawasan SP, PUR dan KI

Kepala Tim (AD)

* Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR
* Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

\*Analis (M)

\* Analisis (AM)

\* Pengawas (AM)

\* Pelaksana Yunior (S)

Satuan Layanan dan Administrasi

Kepala Satuan (AD/M)

Fungsi SDM, Logistik Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan

\*Pelaksana Senior (M)

\*Pelaksana (AM)

\*Pelaksana Yunior (S)

\*Sekretaris (S/AM)

\*Satpam (A/S/AM)

\*Asisten Pelaksana (A)

S

Sumber:https//www.bi.go.id

Gambar : 3.2.

Struktur Organisasi Bank Indonesia

\*Kasir I (AM)

\*Kasir II (AM)

\*Kasir Yunior (S)

\*Asisten Kasir (A)

Unit Operasional SP

Kepala Unit (M)

\*Pelaksana (AM)

\*Pelaksana Yunior (S)

1. Natsir, *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2004) , h. 84 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* h.85 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.,* h. 86 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* h. 87 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* h. 88 [↑](#footnote-ref-5)